

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI MALANG  
NOMOR 185 TAHUN 2019  
TENTANG  
PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN  
DESA KABUPATEN MALANG TAHUN  
2019

**PERUBAHAN RENCANA KERJA  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN MALANG TAHUN 2019**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**1.1. Latar Belakang**

Rencana Kerja adalah rencana pembangunan tahunan yang memuat prioritas pembangunan, arah kebijakan, program dan kegiatan serta pendanaan yang bersifat indikatif.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, keterpaduan pola perencanaan pembangunan daerah menjadi poin yang penting dalam siklus penyelenggaraan pemerintahan. Untuk itu diperlukan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, partisipatif, transparan dan akuntabel. Sehingga dalam menyusun rencana pembangunan daerah maka memperhatikan 10 Asas Umum Penyelenggaraan Negara yaitu:

1. Asas Kepastian Hukum: mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara;
2. Asas Tertib Penyelenggara Negara: menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara Negara;

3. Asas Kepentingan Umum: mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif;
4. Asas Keterbukaan: membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara;
5. Asas Proporsionalitas: mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara Negara;
6. Asas Profesionalitas: mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Asas Akuntabilitas: setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Asas Efisiensi: berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan Negara untuk mencapai hasil kerja yang terbaik;
9. Asas Efektifitas: berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna;
10. Asas Keadilan: setiap tindakan dalam penyelenggaraan negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga Negara.

Tahapan perencanaan pembangunan terdiri dari perencanaan jangka panjang, menengah dan tahunan, yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan dan masyarakat. Perencanaan tahunan Perangkat Daerah atau disebut Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja

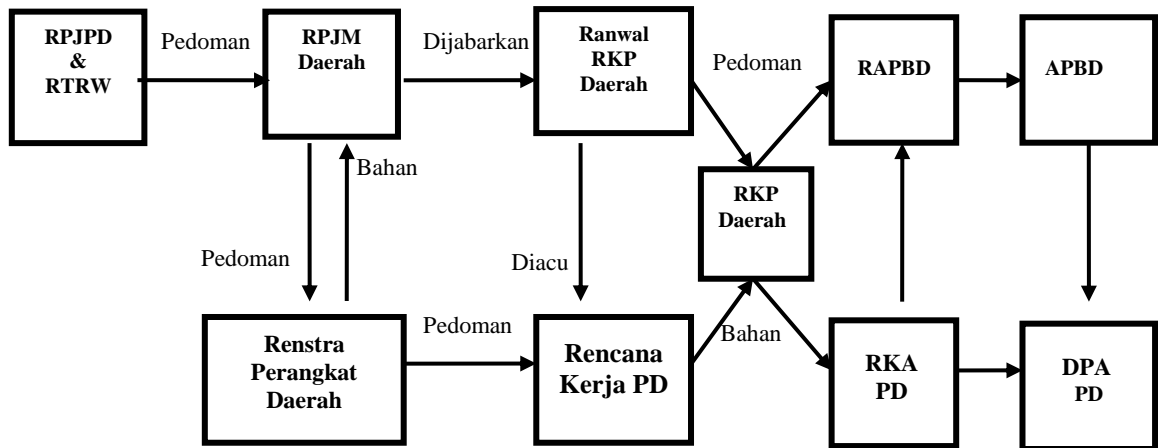
Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Seluruh dokumen pembangunan daerah merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah adalah dokumen yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Daerah. Sebagai bahan masukan penyusunan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah Rancangan Awal Rencana Strategis Perangkat Daerah. Selanjutnya setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah disahkan maka menjadi acuan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah digunakan sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Berkaitan dengan itu, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran - Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun berjalan.

Dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyusun Rencana Kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Rencana Kerja merupakan penjabaran dari Renstra dan dalam penyusunannya mengacu pada Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Kerja sebagai bahan masukan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah. Yang selanjutnya menjadi acuan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah. Rencana Kerja juga mengakomodir hasil musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan, forum Satuan Kerja Perangkat Daerah, pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan kebijakan Pemerintah Pusat.

## KETERKAITAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN



Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai mana telah dituangkan dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang Tahun 2019 mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 dan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, yang tentunya mendukung Visi dan Misi Bupati Malang sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021.

Untuk menyusun Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2019, telah dibentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2019 dengan Keputusan Bupati Malang: 188.45/329/KEP/35.07.013/2018 tanggal 7 Mei 2018 yang bertugas menyusun Rancangan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang Tahun 2019.

Selanjutnya Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang Tahun 2019 ini akan menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

tahun 2019, serta menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan selama tahun 2019 dan selanjutnya akan dievaluasi melalui penilaian terhadap realisasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, dan penyerapan anggaran.

## **1.2. Dasar Hukum Penyusunan**

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025;
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
  20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang;
  21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
  22. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
  23. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  24. Peraturan Bupati Malang Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;
  25. Keputusan Bupati Malang Nomor : 188.45/719/KEP/35.07.013/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Malang Nomor : 188.45/627/KEP/35.07.013/2016 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;

26. Keputusan Bupati Malang Nomor 188.45/329/KEP/35.07.013/2018 tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2019.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang adalah menguraikan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi, target yang akan dicapai dan kerangka pendanaannya sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pada tahun 2019.

Sedangkan Tujuannya adalah:

1. sebagai pedoman atau acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan yang akan dikerjakan dalam 1 (satu) tahun anggaran;
2. memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan ditingkat yang lebih tinggi;
3. menciptakan keterpaduan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang;
4. mengarahkan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun dengan berpedoman pada Rencana Strategis dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. sebagai bahan evaluasi kegiatan.

### **1.4. Sistematika Penyusunan**

Adapun sistematika Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang adalah sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

#### **BAB II HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2019 BERKENAAN**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang sampai dengan Triwulan II Tahun Berkenaan



BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN MALANG

BAB IV PENUTUP

**BAB II**  
**EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II**  
**TAHUN BERKENAAN**

**2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sampai dengan Triwulan II Tahun Berkenaan**

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sampai dengan Triwulan II Tahun 2019, rata-rata capaian program sebesar 32,22%, capaian kinerja sebesar 41,25% dan realisasi anggaran sebesar 28,10%. Kategori capaian Rencana Kerja masih sangat rendah, hal ini disebabkan :

- a. Sampai dengan Triwulan II terdapat beberapa kegiatan yang masih dalam tahap persiapan;
- b. Adanya kegiatan Pilkades Serentak Gelombang III pada 30 Juni 2019 yang memerlukan persiapan dan penanganan khusus di Bidang Pemerintahan Desa, sehingga kegiatan Bidang Pemerintahan Desa yang lain mengalami penundaan;
- c. Ada beberapa kegiatan yang pelaksanaannya disesuaikan dengan pelaksanaan kegiatan Tingkat Provinsi dan Nasional, antara lain Pameran Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat dilaksanakan pada Triwulan III dan Pameran Gelar TTG Nasional dilaksanakan pada Triwulan IV.

Perkiraan capaian Rencana Kerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2019 sesuai target yang ditetapkan sebesar 50%, baik capaian kinerja maupun anggarannya.

Pencapaian target Renstra berdasarkan realisasi program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.1**  
**Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2019**  
**PD : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator	Target Renstra PD pada		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2018		Target kinerja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2019		Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100		10= 6 +8		11=10/5 x100		12
1	2.207.2 1.01	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)</b>	100%	6.398.107.131,00	100%	2.103.304.125,00	100%	1.307.585.800,00	42%	548.630.960,00	42,00	41,96	42%	2.651.935.085,00	42,00	41,45	
	2.207.2 1.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	2400 buah	61.721.000,00	3651 buah	22.000.000,00	2300 buah	12.000.000,00	1686 buah	5.000.000,00	73,30	41,67	1686 buah	27.000.000,00	70,25	43,75	
	2.207.2 1.01.02	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	363 ob	2.631.152.000,00	363 ob	915.165.000,00	363 ob	582.949.800,00	199 ob	274.500.400,00	54,82	47,09	199 ob	1.189.665.400,00	54,82	45,21	-
	2.207.2 1.01.03	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	12 ob	72.453.000,00	0 ob	0,00	12 ob	22.248.000,00	2 ob	11.124.000,00	16,67	50,00	2 ob	11.124.000,00	16,67	15,35	-
	2.207.2 1.01.04	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	10076 jenis	294.171.500,00	3866 jenis	103.866.500,00	1940 jenis	60.000.000,00	696 jenis	24.249.000,00	35,88	40,42	4562 jenis	128.115.500,00	45,28	43,55	-
	2.207.2 1.01.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	32720 jenis	101.364.000,00	1525 jenis	42.845.750,00	32700 jenis	69.703.000,00	14305 jenis	33.198.000,00	43,75	47,63	14305 jenis	76.043.750,00	43,72	75,02	
	2.207.2 1.01.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	60 jenis	12.820.500,00	45 jenis	4.967.500,00	50 jenis	2.540.000,00	10 jenis	760.000,00	20,00	29,92	10 jenis	5.727.500,00	16,67	44,67	-
	2.207.2 1.01.07	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	1584 jenis	28.674.000,00	1584 jenis	12.600.000,00	1584 jenis	5.760.000,00	792 jenis	2.400.000,00	50,00	41,67	792 jenis	15.000.000,00	50,00	52,31	-

1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100		10= 6 +8		11=10/5 x100		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2.207.2 1.01.08	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	13500 hok	936.799.000,00	14940 hok	272.240.000,00	13000 hok	109.000.000,00	4492 hok	47.659.000,00	34,55	43,72	4492 hok	319.899.000,00	33,27	34,15	
	2.207.2 1.01.09	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	165 hok	1.170.617.131,00	423 hok	340.454.375,00	155 hok	253.385.000,00	58 hok	61.995.560,00	37,42	24,47	58 hok	402.449.935,00	35,15	34,38	
	2.207.2 1.01.10	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	575 hok	1.088.335.000,00	565 hok	389.165.000,00	500 hok	190.000.000,00	314 hok	87.745.000,00	62,80	46,18	314 hok	476.910.000,00	54,61	43,82	
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>												<b>42,00</b>	<b>41,96</b>			<b>42,00</b>	<b>41,45</b>	
<b>Predikat Kinerja Program</b>												<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>	
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>												<b>42,92</b>	<b>41,28</b>			<b>42,04</b>	<b>43,22</b>	
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>												<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>	
2	2.207.2 1.02	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>1.736.856.006,00</b>	<b>100%</b>	<b>750.555.100,00</b>	<b>100%</b>	<b>119.910.000,00</b>	<b>16%</b>	<b>18.214.400,00</b>	<b>16,00</b>	<b>15,19</b>	<b>16%</b>	<b>768.769.500,00</b>	<b>16,00</b>	<b>44,26</b>	
	2.207.2 1.02.01	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 Baru yang diadakan (Unit)	8 unit	977.696.000,00	4 unit	435.980.500,00	1 unit	33.960.000,00	0 unit	0,00	0,00	0,00	4 unit	435.980.500,00	50,00	44,59	
	2.207.2 1.02.02	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	18 jenis	327.993.000,00	28 jenis	182.588.700,00	16 jenis	16.435.000,00	0 jenis	0,00	0,00	0,00	0 jenis	182.588.700,00	0,00	55,67	
	2.207.2 1.02.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	19 unit	221.421.000,00	16 unit	91.421.900,00	17 unit	44.385.000,00	9 unit	15.484.900,00	52,94	34,89	9 unit	106.906.800,00	47,37	48,28	-

1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100		10= 6 +8		11=10/5 x100		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2.207.2 1.02.04	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	30 jenis	103.358.006,00	25 jenis	40.564.000,00	12 jenis	10.620.000,00	3 jenis	2.120.000,00	25,00	19,96	3 jenis	42.684.000,00	10,00	41,30	-
	2.207.2 1.02.05	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	4 jenis	106.388.000,00	0 jenis	0,00	1 jenis	14.510.000,00	1 jenis	609.500,00	100,00	4,20	1 jenis	609.500,00	25,00	0,57	
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>												<b>16,00</b>	<b>15,19</b>			<b>16,00</b>	<b>44,26</b>	
<b>Predikat Kinerja Program</b>												<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>	
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>												<b>35,59</b>	<b>11,81</b>			<b>26,47</b>	<b>38,08</b>	
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>												<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>	
<b>3</b>	2.207.2 1.03	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>241.948.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>66.697.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>52.947.000,00</b>	<b>50%</b>	<b>24.300.000,00</b>	<b>50,00</b>	<b>45,89</b>	<b>50%</b>	<b>90.997.000,00</b>	<b>50,00</b>	<b>37,61</b>	
	2.207.2 1.03.01	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)	53 Stel	139.947.000,00	108 Stel	66.697.000,00	54 Stel	28.647.000,00	0 Stel	0,00	0,00	0,00	0 Stel	66.697.000,00	0,00	47,66	-
	2.207.2 1.03.02	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah penyediaan Pakaian Kerja Lapangan (Stel)	209 stel	102.001.000,00	0 stel	0,00	54 stel	24.300.000,00	54 stel	24.300,000,00	100,00	100,00	54 stel	24.300.000,00	25,84	23,82	-
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>												<b>50,00</b>	<b>45,89</b>			<b>50,00</b>	<b>37,61</b>	
<b>Predikat Kinerja Program</b>												<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>	
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>												<b>50,00</b>	<b>50,00</b>			<b>12,92</b>	<b>35,74</b>	
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>												<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>	
<b>4</b>	2.207.2 1.04	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)</b>	<b>100%</b>	<b>13.275.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>25%</b>	<b>600.000,00</b>	<b>25,00</b>	<b>24,00</b>	<b>25%</b>	<b>6.600.000,00</b>	<b>25,00</b>	<b>49,72</b>	
	2.207.2 1.04.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	25 orang	13.275.000,00	35 orang	6.000.000,00	25 orang	2.500.000,00	6 orang	600.000,00	24,00	24,00	6 orang	6.600.000,00	24,00	49,72	
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>												<b>25,00</b>	<b>24,00</b>			<b>25,00</b>	<b>49,72</b>	
<b>Predikat Kinerja Program</b>												<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>	
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>												<b>24,00</b>	<b>24,00</b>			<b>24,00</b>	<b>49,72</b>	

1	2	3	4	Predikat Kinerja Kegiatan								SR		SR		SR		12
				5		6		7		8		9 = 8/7x100		10= 6 +8		11=10/5 x100		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
5	2.207.2 1.05	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)</b>	100%	592.136.500,00	100%	233.578.250,00	100%	111.726.000,00	40%	44.625.500,00	40,00	39,94	40%	278.203.750,00	40,00	46,98	
	2.207.2 1.05.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	12 Buku	530.379.000,00	12 Buku	209.281.750,00	12 Buku	100.000.000,00	9 Buku	44.625.500,00	75,00	44,63	9 Buku	253.907.250,00	75,00	47,87	-
	2.207.2 1.05.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	1 buku	24.098.000,00	1 buku	10.332.000,00	1 buku	4.485.000,00	0 buku	0,00	0,00	0,00	0 buku	10.332.000,00	0,00	42,87	
	2.207.2 1.05.03	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	1 buku	37.659.500,00	1 buku	13.964.500,00	1 buku	7.241.000,00	0 buku	0,00	0,00	0,00	0 buku	13.964.500,00	0,00	37,08	
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>												<b>40,00</b>	<b>39,94</b>			<b>40,00</b>	<b>46,98</b>	
<b>Predikat Kinerja Program</b>												<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>	
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>												<b>25,00</b>	<b>14,88</b>			<b>25,00</b>	<b>42,61</b>	
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>												<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>	
6	2.207.2 1.06	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATA N.</b>	<b>Persentase peningkatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan</b>	100%	3.017.587.300,00	100%	736.252.500,00	100%	564.000.000,00	28%	154.468.200,00	28,00	27,39	28%	890.720.700,00	28,00	29,52	
	2.207.2 1.06.01	Pengembangan Lembaga Adat	Jumlah pembinaan lembaga adat desa	15 Kec.	825.587.500,00	33 Kec.	180.587.500,00	10 Kec.	130.000.000,00	3 Kec.	64.375.800,00	30,00	49,52	3 Kec.	244.963.300,00	20,00	29,67	-

1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100		10= 6 +8		11=10/5 x100		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2.207.2 1.06.02	Peningkatan Partisipasi dan Swadaya Masyarakat	Jumlah laporan swadaya masyarakat pada BBGRM dan jumlah laporan swadaya masyarakat akhir tahun.	33 Kec.	1.204.363.8 00,00	33 Kec.	210.665.0 00,00	33 Kec.	300.000.000 ,00	20 Kec.	84.000.40 0,00	60,61	28,00	20 Kec.	294.665.400 ,00	60,61	24,47	
	2.207.2 1.06.03	Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah desa Bimbingan Teknis LPMD/K	130 desa	987.636.000 ,00	52 desa	345.000.0 00,00	26 desa	134.000.000 ,00	2 desa	6.092.000, 00	7,69	4,55	54 desa	351.092.000 ,00	41,54	35,55	
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>												<b>28,00</b>	<b>27,39</b>			<b>28,00</b>	<b>29,52</b>	
<b>Predikat Kinerja Program</b>												<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>	
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>												<b>32,77</b>	<b>27,36</b>			<b>40,71</b>	<b>29,90</b>	
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>												<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>	
<b>7</b>	2.207.2 1.07	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT</b>	<b>Persentase peningkatan pemberdayaan lembaga ekonomi masyarakat</b>	<b>100%</b>	<b>2.846.635.0 00,00</b>	<b>54.67 %</b>	<b>1.042.082. 000,00</b>	<b>100%</b>	<b>795.000.000 ,00</b>	<b>26%</b>	<b>207.164.2 50,00</b>	<b>26,00</b>	<b>26,06</b>	<b>26%</b>	<b>1.249.246.2 50,00</b>	<b>26,00</b>	<b>43,89</b>	
	2.207.2 1.07.01	Pengembangan Lembaga Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah BUMDesa yang dibentuk.	18 desa	1.206.825.0 00,00	12 desa	533.800.0 00,00	14 desa	450.000.000 ,00	7 desa	70.615.25 0,00	50,00	15,69	7 desa	604.415.250 ,00	38,89	50,08	-
	2.207.2 1.07.02	Pengembangan Usaha Sektor Informal	Jumlah pelatihan usaha sektor informal	18 desa	532.000.000 ,00	6 desa	122.850.0 00,00	4 desa	195.000.000 ,00	3 desa	81.125.00 0,00	75,00	41,60	9 desa	203.975.000 ,00	50,00	38,34	
	2.207.2 1.07.03	Pengembangan Ekonomi Masyarakat dan Rumah Tangga Sasaran	Jumlah pelatihan usaha ekonomi masyarakat dan RTS	33 Kec.	897.176.000 ,00	36 Kec.	340.304.0 00,00	33 Kec.	150.000.000 ,00	13 Kec.	55.424.00 0,00	39,39	36,95	13 Kec.	395.728.000 ,00	39,39	44,11	
			Jumlah Pelatihan usaha Pokja Posyandu	16 desa	210.634.000 ,00	0 desa	45.128.00 0,00	16 desa	0,00	0 desa	0,00	0,00	0,00	0 desa	45.128.000, 00	0,00	21,42	-
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>												<b>26,00</b>	<b>26,06</b>			<b>26,00</b>	<b>43,89</b>	
<b>Predikat Kinerja Program</b>												<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>	
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>												<b>41,10</b>	<b>31,41</b>			<b>32,07</b>	<b>51,32</b>	
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>												<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>R</b>	

1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
8	2.207.2 1.08	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Persentase penyampaian laporan keuangan desa tepat waktu dan sesuai Peraturan Bupati.</b>	<b>100%</b>	<b>5.567.780.5 00,00</b>	<b>100%</b>	<b>2.002.258. 048,00</b>	<b>100%</b>	<b>2.510.941.0 00,00</b>	<b>18%</b>	<b>430.823.0 00,00</b>	<b>18,00</b>	<b>17,16</b>	<b>18%</b>	<b>2.433.081.0 48,00</b>	<b>18,00</b>	<b>43,70</b>	
	2.207.2 1.08.01	Penataan Pemerintahan Desa	Jumlah desa Pelatihan aparatur Pemerintahan Desa	378 Desa	1.031.585.0 00,00	378 Desa	357.533.5 00,00	378 Desa	300.000.000 ,00	0 Desa	0,00	0,00	0,00	0 Desa	357.533.500 ,00	0,00	34,66	
			Jumlah desa berprestasi tingkat kabupaten	20 Desa	792.465.000 ,00	4 Desa	241.701.5 00,00	4 Desa	210.000.000 ,00	4 Desa	152.200.5 00,00	100,00	72,48	8 Desa	393.902.000 ,00	40,00	49,71	-
			Jumlah data Profil Desa/kelurahan yang valid	390 Desa/ Kel.	377.000.000 ,00	390 Desa/ Kel.	123.355.0 00,00	390 Desa/ Kel.	100.000.000 ,00	0 Desa/ Kel.	0,00	0,00	0,00	0 Desa/ Kel.	123.355.000 ,00	0,00	32,72	
			Jumlah Desa yang difasilitasi pemilihan dan pengangkatan Kepala Desa.	376 Desa	1.424.121.0 00,00	100 Desa	661.231.2 45,00	269 Desa	1.055.941.0 00,00	88 Desa	49.969.00 0,00	32,71	4,73	188 Desa	711.200.245 ,00	50,00	49,94	
	2.207.2 1.08.02	Penatausahaan Keuangan Desa	Jumlah pelatihan penatausahaan keuangan desa	378 Desa	1.530.479.5 00,00	378 Desa	489.867.4 99,00	378 Desa	720.000.000 ,00	300 Desa	228.653.5 00,00	79,37	31,76	300 Desa	718.520.999 ,00	79,37	46,95	
	2.207.2 1.08.03	Penatausahaan Aset Desa	Jumlah aset desa yang didata	378 Desa	412.130.000 ,00	378 Desa	128.569.3 04,00	378 Desa	125.000.000 ,00	0 Desa	0,00	0,00	0,00	0 Desa	128.569.304 ,00	0,00	31,20	
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>												<b>18,00</b>	<b>17,16</b>			<b>18,00</b>	<b>43,70</b>	
<b>Predikat Kinerja Program</b>												<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>	
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>												<b>35,35</b>	<b>18,16</b>			<b>28,23</b>	<b>40,86</b>	
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>												<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>	
9	2.207.2 1.09	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN POTENSI DESA</b>	<b>Persentase peningkatan pengembangan potensi desa.</b>	<b>100%</b>	<b>3.328.274.0 00,00</b>	<b>62.50 %</b>	<b>1.147.754. 048,00</b>	<b>100%</b>	<b>610.000.000 ,00</b>	<b>45%</b>	<b>277.885.9 50,00</b>	<b>45,00</b>	<b>45,56</b>	<b>45%</b>	<b>1.425.639.9 98,00</b>	<b>45,00</b>	<b>42,83</b>	
	2.207.2 1.09.01	Pengembangan Kawasan Perdesaan	Jumlah Desa yang diberi Sosialisasi dan Pendampingan Pengembangan Kawasan Perdesaan	8 desa	955.971.000 ,00	16 desa	348.643.0 00,00	8 desa	150.000.000 ,00	6 desa	85.988.00 0,00	75,00	57,33	6 desa	434.631.000 ,00	75,00	45,46	-



1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100		10= 6 +8		11=10/5 x100		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2.207.2 1.09.02	Pengembangan Sumber Daya Desa	Jumlah Pelatihan Pengembangan Sumber Daya Desa	4 desa	934.943.000 ,00	7 desa	428.018.0 00,00	4 desa	150.000.000 ,00	3 desa	70.865.75 0,00	75,00	47,24	3 desa	498.883.750 ,00	75,00	53,36	-
			Pemutakhiran Data Indeks Desa Membangun (IDM)/Jumlah desa maju Kabupaten Malang	140 desa	278.000.000 ,00	0 desa	0,00	129 desa	100.000.000 ,00	165 desa	94.596.70 0,00	127,91	94,60	165 desa	94.596.700, 00	117,86	34,03	
	2.207.2 1.09.03	Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Peralatan TTG yang dipromosikan pada Gelar TTG Nasional	1 unit	668.820.000 ,00	2 unit	250.293.0 48,00	1 unit	100.000.000 ,00	0 unit	0,00	0,00	0,00	0 unit	250.293.048 ,00	0,00	37,42	-
			Jumlah Desa pemanfaat /penerima bantuan peralatan TTG	12 desa	490.540.000 ,00	12 desa	120.800.0 00,00	12 desa	110.000.000 ,00	6 desa	26.435.50 0,00	50,00	24,03	6 desa	147.235.500 ,00	50,00	30,01	.
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>												<b>45,00</b>	<b>45,56</b>			<b>45,00</b>	<b>42,83</b>	
<b>Predikat Kinerja Program</b>												<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>	
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>												<b>65,58</b>	<b>44,64</b>			<b>63,57</b>	<b>40,06</b>	
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>												<b>R</b>	<b>SR</b>			<b>R</b>	<b>SR</b>	
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program Total (%)</b>												<b>32,22</b>	<b>31,46</b>			<b>32,22</b>	<b>42,22</b>	
<b>Predikat Kinerja Program Total</b>												<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>	
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan Total (%)</b>												<b>41,25</b>	<b>30,23</b>			<b>36,29</b>	<b>41,07</b>	
<b>Predikat Kinerja Kegiatan Total</b>												<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>	

**BAB III**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**  
**DAN DESA**

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2019 disusun sebagai acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan, baik yang bersifat teknokratis, *top down*, *bottom up* maupun politis. Rencana kerja yang bersifat teknokratis berasal dari rencana program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dengan memperhatikan target-target kinerja yang akan dicapai selama periode Renstra. Rencana kerja yang bersifat *top down*, merupakan program dan kegiatan perangkat daerah yang mengakomodir program-program dari Instansi Vertikal seperti Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Rencana kerja yang bersifat *bottom up*, merupakan program dan kegiatan perangkat daerah yang mengakomodir usulan dari pemerintah desa yang diusulkan melalui Musrenbang Kecamatan yang dimasukkan pada aplikasi e Musrenbang. Sedangkan Rencana kerja yang bersifat politis merupakan program dan kegiatan perangkat daerah yang mengakomodir usulan pokok-pokok pikiran dari Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Malang.

Pendanaan dari pelaksanaan program dan kegiatan yang merupakan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang Tahun 2019, berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019.

Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3

**Rencana Kerja dan Pendanaan  
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2019**

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA LANGSUNG							
			SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH (+/-)	LOKASI	SUMBER DANA	CATATAN PENTING
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.207.2 1.01	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)</b>	<b>100%</b>	<b>1.307.585.800,00</b>	<b>100%</b>	<b>1.327.585.800,00</b>	<b>20.000.000,00</b>			
2.207.2 1.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	2300 buah	12.000.000,00	2300 buah	12.000.000,00	0,00	Dinas PMD Kab. Malang	APBD Kabupaten	
2.207.2 1.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	363 ob	582.949.800,00	364 ob	602.949.800,00	20.000.000,00	Dinas PMD Kab. Malang	APBD Kabupaten	Penambahan dari pergeseran rekening.
2.207.2 1.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	1 ob	22.248.000,00	1 ob	22.248.000,00	0,00	Dinas PMD Kab. Malang	APBD Kabupaten	
2.207.2 1.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	1940 jenis	60.000.000,00	1940 jenis	60.000.000,00	0,00	Dinas PMD Kab. Malang	APBD Kabupaten	
2.207.2 1.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak yang disediakan (Jenis)	32700 jenis	69.703.000,00	2415 jenis	69.703.000,00	0,00	Dinas PMD Kab. Malang	APBD Kabupaten	
2.207.2 1.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	50 jenis	2.540.000,00	50 jenis	2.540.000,00	0,00	Dinas PMD Kab. Malang	APBD Kabupaten	
2.207.2 1.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	1584 jenis	5.760.000,00	1584 jenis	5.760.000,00	0,00	Dinas PMD Kab. Malang	APBD Kabupaten	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.207.2 1.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	13000 hok	109.000.000,00	13000 hok	109.000.000,00	0,00	Dinas PMD Kab. Malang	APBD Kabupaten	
2.207.2 1.01.18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	155 hok	253.385.000,00	155 hok	253.385.000,00	0,00	Dinas PMD Kab. Malang	APBD Kabupaten	
2.207.2 1.01.19	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	500 hok	190.000.000,00	500 hok	190.000.000,00	0,00	Dinas PMD Kab. Malang	APBD Kabupaten	
<b>2.207.2 1.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>119.910.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>159.910.000,00</b>	<b>40.000.000,00</b>			
2.207.2 1.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 Baru yang diadakan (Unit)	1 unit	33.960.000,00	2 unit	56.960.000,00	23.000.000,00	Dinas PMD Kab. Malang	APBD Kabupaten	Penambahan dari pengeseran rekening, untuk pengadaan kendaraan dinas roda dua 1 unit.
2.207.2 1.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	16 jenis	16.435.000,00	17 jenis	28.435.000,00	12.000.000,00	Dinas PMD Kab. Malang	APBD Kabupaten	Pergeseran rekening untuk pengadaan peralatan gedung kantor (laptop 1 unit).
2.207.2 1.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	17 unit	44.385.000,00	17 unit	44.385.000,00	0,00	Dinas PMD Kab. Malang	APBD Kabupaten	
2.207.2 1.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	12 jenis	10.620.000,00	12 jenis	10.620.000,00	0,00	Dinas PMD Kab. Malang	APBD Kabupaten	
2.207.2 1.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	1 jenis	14.510.000,00	1 jenis	19.510.000,00	5.000.000,00	Dinas PMD Kab. Malang	APBD Kabupaten	Penambahan dari pengeseran rekening.
<b>2.207.2 1.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>52.947.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>52.947.000,00</b>	<b>0,00</b>			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.207.2 1.03.05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)	54 Stel	28.647.000,00	54 Stel	28.647.000,00	0,00	Dinas PMD Kab. Malang	APBD Kabupaten	
2.207.2 1.03.03	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah penyediaan Pakaian Kerja Lapangan (Stel)	54 stel	24.300.000,00	54 stel	24.300.000,00	0,00	Dinas PMD Kab. Malang	APBD Kabupaten	
<b>2.207.2 1.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)</b>	<b>100%</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>0,00</b>			
2.207.2 1.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	25 orang	2.500.000,00	25 orang	2.500.000,00	0,00	Dinas PMD Kab. Malang	APBD Kabupaten	
<b>2.207.2 1.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)</b>	<b>100%</b>	<b>111.726.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>111.726.000,00</b>	<b>0,00</b>			
2.207.2 1.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	12 Buku	100.000.000,00	12 Buku	103.224.000,00	3.224.000,00	Dinas PMD Kab. Malang	APBD Kabupaten	Penambahan dari pergeseran rekening kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.
2.207.2 1.06.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	1 buku	4.485.000,00	1 buku	2.997.000,00	(1.488.000,00)	Dinas PMD Kab. Malang	APBD Kabupaten	Pergeseran rekening, dialihkan ke Kegiatan Penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
2.207.2 1.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	1 buku	7.241.000,00	1 buku	5.505.000,00	(1.736.000,00)	Dinas PMD Kab. Malang	APBD Kabupaten	Pergeseran rekening, dialihkan ke Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.207.2 1.07	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATA N.</b>	<b>Persentase peningkatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan</b>	66.67%	564.000.000,00	100%	564.000.000,00	0,00			
2.207.2 1.07.05	Pengembangan Lembaga Adat	Jumlah identifikasi lembaga adat dan pembinaan lembaga adat desa	4 Kec.	130.000.000,00	4 Kec.	130.000.000,00	0,00	33 Kec.	APBD Kabupaten	
2.207.2 1.07.06	Peningkatan Partisipasi dan Swadaya Masyarakat	Jumlah laporan swadaya masyarakat pada BBGRM dan jumlah laporan swadaya masyarakat akhir tahun.	33 Kec.	300.000.000,00	33 Kec.	300.000.000,00	0,00	33 kec	APBD Kabupaten	-
2.207.2 1.07.04	Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah desa Bimbingan Teknis LPMD/K	26 desa	134.000.000,00	26 desa	134.000.000,00	0,00	130 desa	APBD Kabupaten	
2.207.2 1.08	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT</b>	<b>Persentase peningkatan pemberdayaan lembaga ekonomi masyarakat</b>	54.67%	795.000.000,00	100%	760.000.000,00	(35.000.000,00)			
2.207.2 1.08.01	Pengembangan Lembaga Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah BUMDesa yang dibentuk.	14 desa	450.000.000,00	14 desa	415.000.000,00	(35.000.000,00)	378 desa	APBD Kabupaten	Dialihkan ke kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas dan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor.
2.207.2 1.08.02	Pengembangan Usaha Sektor Informal	Jumlah pelatihan usaha sektor informal	4 desa	195.000.000,00	4 desa	195.000.000,00	0,00	16 Desa	APBD Kabupaten	
2.207.2 1.08.04	Pengembangan Ekonomi Masyarakat dan Rumah Tangga Sasaran	Jumlah pelatihan usaha ekonomi masyarakat dan RTS	33 Kec.	150.000.000,00	33 Kec.	150.000.000,00	0,00	33 Kec.	APBD Kabupaten	
		Jumlah Pelatihan usaha Pokja Posyandu	16 desa	0,00	16 desa	0,00	0,00	78 desa	APBD Kabupaten	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.207.2 1.10	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Persentase penyampaian laporan keuangan desa tepat waktu dan sesuai Peraturan Bupati.</b>	<b>100%</b>	<b>2.510.941.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>3.110.941.000,00</b>	<b>600.000.000,00</b>			
2.207.2 1.10.08	Penataan Pemerintahan Desa	Jumlah desa Pelatihan aparatur Pemerintahan Desa	378 Desa	300.000.000,00	378 Desa	900.000.000,00	600.000.000,00	378 desa	APBD Kabupaten	Penambahan anggaran digunakan untuk pembekalan/pelatihan Kepala Desa dan Pelatihan Penyusunan RKP Desa.
		Jumlah desa berprestasi tingkat kabupaten	4 Desa	210.000.000,00	4 Desa	210.000.000,00	0,00	15 desa	APBD Kabupaten	
		Jumlah data Profil Desa/kelurahan yang valid	390 Desa/Kel.	100.000.000,00	390 Desa/Kel.	100.000.000,00	0,00	390 desa/kel.	APBD Kabupaten	
		Jumlah Desa yang difasilitasi pemilihan dan pengangkatan Kepala Desa.	307 Desa	1.055.941.000,00	269 Desa	1.055.941.000,00	0,00	378 desa	APBD Kabupaten	
2.207.2 1.10.09	Penatausahaan Keuangan Desa	Jumlah pelatihan penatausahaan keuangan desa	378 Desa	720.000.000,00	378 Desa	720.000.000,00	0,00	378 desa	APBD Kabupaten	-
2.207.2 1.10.10	Penatausahaan Aset Desa	Jumlah aset desa yang didata	378 Desa	125.000.000,00	378 Desa	125.000.000,00	0,00	378 desa	APBD Kabupaten	
2.207.2 1.14	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN POTENSI DESA</b>	<b>Persentase peningkatan pengembangan potensi desa.</b>	<b>62.50%</b>	<b>610.000.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>835.000.000,00</b>	<b>225.000.000,00</b>			
2.207.2 1.14.01	Pengembangan Kawasan Perdesaan	Jumlah Desa yang diberi Sosialisasi dan Pendampingan Pengembangan Kawasan Perdesaan	8 desa	150.000.000,00	14 desa	150.000.000,00	0,00	40 Desa	APBD Kabupaten	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.207.2 1.14.02	Pengembangan Sumber Daya Desa	Jumlah Pelatihan Pengembangan Sumber Daya Desa	4 desa	150.000.000,00	1 desa	300.000.000,00	150.000.000,00	24 Desa dan 1 Desa (Lokasi TMMD Tahun 2019 di Desa Kedungsala m Kec. Donomulyo)	APBD Kabupaten	Penambahan Rp. 150.000.000,- berasal dari Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Timur untuk Kegiatan TMMD di Desa Kedungsalam Kec. Donomulyo.
		Pemutakhiran Data Indeks Desa Membangun (IDM)/Jumlah desa maju Kabupaten Malang	115 desa	100.000.000,00	129 desa	200.000.000,00	100.000.000,00	378 desa	APBD Kabupaten	Penambahan anggaran untuk sosialisasi dan Bimtek Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2019 berdasarkan Surat Dirjen PPMD Kementerian Desa, PDTT RI. Nomor 08/PR.03.02/III/2019 tanggal 19 Maret 2019, perihal Pemutakhiran IDM Tahun 2019.
2.207.2 1.14.03	Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Peralatan TTG yang dipromosikan pada Gelar TTG Nasional	1 unit	100.000.000,00	0 unit	0,00	(100.000.000,00)	Kab. Malang	APBD Kabupaten	Pengurangan karena tidak ada Gelar TTG Nasional 2019, anggaran dialihkan ke rekening lain.
		Jumlah Desa pemanfaat /penerima bantuan peralatan TTG	12 desa	110.000.000,00	12 desa	185.000.000,00	75.000.000,00	12 desa	APBD Kabupaten	Penambahan dari pergeseran rekening Gelar TTG untuk pelatihan TTG dan pengadaan bahan praktek TTG.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja sangat penting artinya sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat dengan keterlibatan lebih banyak pelaku pembangunan (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance*, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijakan yang dampaknya berpengaruh ke bawah sehingga keberpihakan pada masyarakat benar-benar dikedepankan.

Pada Tahun 2019 terdapat 9 (sembilan) program dan 33 (tiga puluh tiga) kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan.

Rencana tindaklanjut jika dalam proses pelaksanaan program dan kegiatan terjadi perubahan yang disebabkan adanya kebijakan-kebijakan baru, kebutuhan atau adanya peraturan-peraturan baru, maka akan dilaksanakan efisiensi dalam penggunaan anggaran dengan mekanisme mengusulkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau melaksanakan program dan kegiatan tersebut pada tahun berikutnya.

Demikian Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang Tahun 2019 ini dibuat untuk digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun dan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang serta mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019.

Demikian untuk dilaksanakan.

**BUPATI MALANG,**

**SANUSI**